



TATA KELOLA BADAN USAHA MILIK DESA DALAM PERSPEKTIF KELEMBAGAAN (STUDI DI DESA BAKALAN KECAMATAN PURWOSARI)

Sony Rizal, Rossa Ilma Silfiah

Universitas Yudharta Pasuruan

ARTICLE INFO

Article history:

Received September 2023

Revised September 2023

Accepted September 2023

Available online September 2023

Kata Kunci: Manajemen, Tatakelola, Badan Usaha Milik Desa, Kelembagaan



This is an open access article under the [CC BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license. Copyright © 2023 by Author. Published by Triwikrama

Abstract

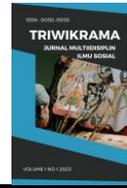
This study examines the governance of village-owned enterprises from an institutional perspective to find out about governance in the Bumdes Baklan Rise from an institutional perspective and to find out the supporting and inhibiting factors in the governance of village-owned enterprises. The indicators used are institutional theory (Scott 2008), namely regulative, normative, culture cognitive. This study aims to find out how the implementation of governance of village-owned enterprises in the village of Akaan from an institutional perspective and also this study aims to determine the supporting and inhibiting factors for the implementation of governance of village-owned enterprises from an institutional perspective. This study used qualitative research methods. Methods of data collection is done by observation, interviews, and documentation. Data analysis techniques Miles Huberman (1992) namely data reduction,

data presentation, verification and drawing conclusions. The results of the study show that the governance of the village-owned enterprise belonging to the village of Akaan has implemented three indicators, namely regulative, normative and cognitive culture. Then the inhibiting factors in BUM Desa governance are only in the bureaucratic structure which overlaps a bit in terms of division of tasks or positions and also the resources that are still lacking to support the implementation of good governance. in terms of communication, resources and attitudes of implementers, from the analysis the researchers found that these 3 factors were supporting and supporting the implementation of BUM Desa Bakalan Bangkit governance.

Keywords: management, Governance, village-owned enterprises, institutions

Abstrak (Indonesia)

Penelitian ini mengkaji tentang tatakelolala badan usaha milik desa dalam perspektif kelembagaan untuk mengetahui tentang tatkelola yang ada di Bumdes bakalan bangkit dalam perpektif kelembagaan Adapun indikator yang digunakan adalah menggunakan teori institusional (scoot 2008) yaitu *regulative, normative, culture congnitif* Penelitian ini bertujuan untuk Untuk mengetahui bagaiman penerapan Tata Kelola badan usaha milik desa di desa Bakalan dalam perspektif kelembagaan dan juga penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor pendukung dan penghambat penerapan tatakelola badan usaha milik desa dalam perspektif kelembagaan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Metode pengumpulan data dilakukan dengan observasi, wawancara, dan dokumentasi. Teknik analisis data Miles Huberman (1992) yaitu reduksi data, penyajian data, verifikasi dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan pelaksanaan tatkelola badan usaha milik desa Bakalan sudah menerapkan dari tiga indikator yaitu *regulatif, normativ* dan *culture congnitif*. Lalu faktor penghambat dari dalam tata kelola BUM Desa tersebut hanya dalam struktur



birokrasi yang sedikit tumpang tindih dalam hal pembagian tugas atau jabatan dan juga sumber daya yang masih kurang untuk menunjang dalam penerapan tatakelola yang baik. Sedangkan faktor pendukung dari tata kelola BUM Desa diantaranya adalah dalam hal komunikasi, sumber daya dan sikap pelaksana, dari analisis peneliti mendapatkan hasil bahwa 3 faktor tersebut yang menjadi penunjang dan pendukung dalam penerapan dalam tata kelola BUM Desa Bakalan Bangkit.

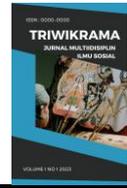
correnpondence : sonyrizal2000@gmail.com

PENDAHULUAN

Menurut jepri (2019) Pemerintah desa membentuk dan mengelola Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) berdasarkan otonomi daerah yaitu dengan adanya Peraturan desa yang berpedoman pada Peraturan Daerah. Bumdes pada operasionalnya menampung kegiatan-kegiatan ekonomi masyarakat dalam bentuk kelembagaan atau badan usaha yang dikelola dengan professional oleh pengurusnya. pendirian dan pembentukan Bumdes dilaksanakan melalui musyawarah desa yaitu dengan melihat kondisi ekonomi dan sosial budaya masyarakat.

Desa Bakalan Kecamatan Purwosari merupakan salah satu desa yang ada di Kecamatan Purwosari Kabupaten Pasuruan yang memiliki BUM Desa. BUM Desa yang memiliki nama Bakalan bangkit yang berdiri pada tahun 2018 adalah BUM Desa yang didirikan sebagaimana pemerintah desa melaksanakan kebijakan yang ada di dalam Peraturan Pemerintah No.43 tahun 2014 mengenai pengelolaan perekonomian di tingkat desa.

Dari hasil observasi peneliti masih ada beberapa persoalan di dalam BUM Desa .
a. Manajemen pengelolaan yang masih belum maksimal
b. Masyarakat desa yang kurang tahu tentang keberadaan Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) dan tidak mengetahui juga tentang program atau unit usaha yang di miliki oleh Badan Usaha milik Desa (Bumdes).
c. kurangnya sumberdaya manusia terutama pemuda dalam pengelolaan badan usaha milik desa
Dari



beberapa permasalahan tersebut peneliti ingin mengetahui bagaimana Tatakelola yang ada pada badan usaha milik desa bakalan dengan menggunakan perspektif kelembagaan berdasarkan pemaparan (scoot 2008) tentang institusionalisme dimana pada teori tersebut menekankan tiga pilar kelembagaan .Pilar regulatif .Pilar normative ,cultur congnitif

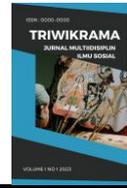
METODOLOGI

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif, melalui pendekatan kualitatif nantinya akan menghasilkan gambaran akan suatu kejadian atau fenomena berdasarkan realita objek dilapangan secara keseluruhan, baik dalam bentuk kalimat tertulis maupun lisan, hasil tersebut merupakan buahh dari pendekatan terhadap objek pengamatan baik dari masyarakat atau perilaku masyarakat yang dilakukan sesuai dengan prosedur pengamatan (Taylor dalam Moelong, 2017:24). Sedangkan penggunaan metode deskriptif dalam penelitian ini menjadi bentuk upaya untuk pemecahan masalah, dengan cara menyelaraskan dan membandingkan antara penggunaan teori dengan fakta yang ada dilapangan. Data dalam penelitian ini didapatkan melalui wawancara dengan enam petugas verifikasi dan kleader sector verfak, dokumentasi pada beberapa litiatur dan berkas terkait verfak keanggotaan dan observasi terhadap realita pelaksanaan verfak dilapangan. Data yang diperoleh kemudian di analisis secara kualitatis melalui empat langkah: pengumpulan data, reduksii data, penyajian data serta penarikan kesimpulan Miles Huberman dan Saldana (2014).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Regulatif

Pilar regulatif sangat penting karena diperlukan untuk mengarahkan pelaksanaan kelembagan Bumdes agar berjalan sesuai dengan tujuan yang ditetapkan dan agar pelaksanaan kebijakan sesuai dengan program yang sudah direncanakan. Penerapan pilar regulatif yang berbentuk produk aturan, norma maupun standarisasi akan sangat mempengaruhi proses kelembagan Bumdes karena dapat menyebabkan pelaksana



kesulitan dalam hal pengelolaan dan pengadministrasian kebijakan. Pilar regulatif juga sebagai pondasi dasar dalam mengambil setiap kebijakan yang akan di jalankan oleh para pengurus Bumdes dan berkaitan pula dengan proses evaluasi dan pertanggungjawaban tiap bagian serta proses pemberdayaan masyarakat sebagai pendorong gerak usaha ekonomi yang dilakukan.

sejauh ini Bumdes Bakalan Bangkit telah memiliki dasar hukum yakni PP 11 tahun 2021 tentang tang badan usah milik desa. Selain itu juga di dukung dengan beberapa aturan lainnya yakni seperti Perdes dan AD/ART yang selama ini telah ditetapkan secara internal untuk menjadi aspek konstituen yang jelas.

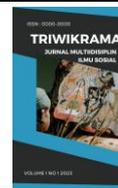
Normative

Normatif dapat didefinisikan sebagai suatu konsep norma-norma yang digunakan dalam suatu lembaga, dimana norma tersebut merupakan pedoman dasar bagi kebijakan-kebijakan lembaga. Norma juga dipandang dapat membangkitkan suatu perasaan kuat untuk para anggota dari lembaga tersebut.

Dalam pendekatan ini menjadi penting untuk dilakukan oleh kelembagaan dalam hal ini Bumdes Bakalan Bangkit. Secara implisit pendekatan ini membuktikan bahwa dalam kelembagaan terdapat aturan-aturan normatif yang berisi perspektif, evaluasi dan kewajiban. Aspek normatif mencakup nilai dan norma. Nilai sendiri dimaknai dengan konsepsi mengenai apa yang selama ini menjadi identitas dari Lembaga Bumdes Bakalan Bangkit ini., dan juga norma sendiri akan menjadi pedoman dalam kelembagaan Bumdes agar semua yang dijalankan dalam Bumdes selalu sesuai dengan nilai-nilai, atau ciri khas dan sumberdaya yang ada dalam Bumdes sehingga dapat disesuaikan dengan,kebutuhan unit unit usaha yang ada

Congnitif budaya

Yaitu pemikiran tentang suatu budaya yang ada dalam lembaga. Kognitif budaya diantaranya berisi tentang paham, keyakinan, pengikat, dan bersifat isomorf. Kognitif dalam makna budaya dalam teori ini akan sangat penting, karena kognitif budaya dalam teori ini lebih bisa berubah-ubah dibandingkan dengan dua pilar lain yaitu regulatif dan normative



Pada Bumdes Bakalan Bangkit telah menetapkan visi misi sebagai bahan acuan dalam pengelolaan badan usaha milik desa. Hal tersebut disinyalir agar nantinya proses pengelolaan badan usaha milik desa bisa bekerja secara maksimal dan sesuai dengan apa yang di inginkan atau ditargetkan oleh badan usaha milik desa itu sendiri

KESIPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang peneliti lakukan mengenai Tatakelola badan usah milik desa Bakalan dalam persepektif kelembagaan pada badan usaha milik desa baklan sudah menerapkan terkait dengan tiga pilar kelembagaan mulai dari pilar regulatif dimana terdapat aturan sebagai landasan dalam pengelolaan badan usaha milik desa bakalan pada aspek normative pada aspek ini yang menkan kan pada evaluasi diman pada bumdes baklan sudah menerapkan pilar tesebut begitu pula denga pilar congnitif budaya dengan adanya visi misi sebagai landasan atau motivasi dalam mengelola badan usaha milik desa

DAFTARPUSTAKA

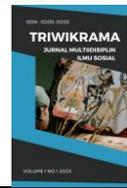
- Jepri, A. (2019). *Strategi Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Dalam Upaya Mewujudkan Kemandirian Ekonomi Melalui Bumdes Program Pasar Desa*. *Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik*, 8(4), 303–310.
- Richard Scoot, *Institutions And Organization: Ideas and Interest* (USA: Sage Publication, 2008), hlm. 59-64.
- Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT. RemajaRosdakarya, 2008),6.
- Lexy J. Moleong. 2005. *metodologi penelitian kualitatif*, Bandung: RemajaRosdakarya
- Sofyani, H., Rozi, H. F., & Amalia, F. A. (2020). Tekanan Instiusional dalam Praktik Tata Kelola Badan Usaha Milik Desa (Bumdes). *Jurnal Kajian Akuntansi*, 4(2), 111-134.
- Shafritz, Russell, W., P. Borick, C., & C. Hyde, A. (2017). Introducing public administration. In *Teaching Political Science* (Vol. 3, Issue 1).

Triwikrama: Jurnal Ilmu Sosial

Volume 01, Number 04, 2023 pp. 1-6

E-ISSN: 2988-1986

Open Access:



Sedarmayanti. 2000. *Restrukturisasi dan Pemberdayaan Organisasi untuk Menghadapi Dinamika Perubahan Lingkungan. Mandar Maju: Bandung*

